

ABSTRAK

Obat pelancar datang bulan yang pada awalnya digunakan wanita untuk melancarkan haid serta meredakan rasa nyeri ketika menstruasi datang kini disalahgunakan. Obat pelancar datang bulan diyakini dapat meluruhkan janin yang terdapat pada kandungan seorang wanita. Oleh karena itu, banyak pihak tidak bertanggungjawab kerap mempromosikan obat tersebut serta menawarkan kepada wanita yang hamil di luar nikah, dikarenakan obat pelancar datang bulan tergolong memiliki harga yang relatif murah serta mudah di dapat karena dijual bebas di pasaran. Untuk pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan tersebut belum diatur secara tegas dalam pengaturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana para pelaku yang menawarkan obat pelancar datang bulan tersebut terhadap seorang wanita. Maka dari itu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam peraturan perundang-undangan pasal 299 KUHP perlu adanya pembuktian bahwa adanya perbuatan sengaja untuk mengobati, atau memberitahukan maupun menimbulkan harapan bahwa kehamilan seorang wanita dapat gugur.

Kata kunci: Orang yang menawarkan obat pelancar datang bulan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Medication for menstruation which was originally used by women to launch menstruation and relieve pain when menstruation comes is abused. Medication for menstruation is believed to shed the fetus found in the womb of a woman. Therefore, many parties are not responsible for often promoting the drug and offering it to women who are pregnant out of wedlock, because expediting drugs are classified as having relatively low prices and are easy to obtain because they are sold freely on the market. To ask for help offered by surfers coming this month has not been officially regulated in the regulatory arrangements. The purpose of this thesis is to find out the criminal sanctions of the perpetrators who offered expediting drugs that month to a woman. To get answers to these problems, a regulatory approach is used. Article 299 of the Indonesian Criminal Code requires proof that there is a deliberate act to treat, or notify or raise hopes that a woman's pregnancy may die.

Keywords: People offering expediting drugs, criminal acts, criminal liability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan terhadap khadirat Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku yang Menawarkan Obat Pelancar Datang Bulan.” Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih secara tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada periode 6 Agustus 2016 – 31 Desember 2018, dan Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan baru Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam masa perkuliahan penulis.
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak/Ibu Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran untuk skripsi ini.
5. Ibu Nurwahjuni selaku Dosen wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H yang senantiasa sabar dan tulus memberikan arahan kepada penulis, untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
- 7 Kedua orang tua dari saya, Bapak Priyo dan Ibu Titik, Adik saya Vanessa dan seluruh keluarga saya yang dengan kasih sayangnya, untuk selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih atas bantuan dan motivasi yang sudah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi dan semoga bermanfaat.

Surabaya, 9 Desember 2019

Natasya Putri I.P

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949)